

Pengaruh Faktor Ekonomi dan Sosial terhadap IPM di Eks Karesidenan Kediri

Linda Ayu Tivani, Kukuh Arisetyawan

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Diterima: 2 Januari, 2026 | Revisi: 30 Maret, 2026 | Disetujui: 31 Maret 2026 | Diterbitkan: 1 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Akses Kesehatan, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks-Karesidenan Kediri periode 2019–2023. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data panel dan perangkat lunak Stata 14. Hasil menunjukkan bahwa UMK dan Akses Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan TPT, kemiskinan, dan APS tidak signifikan secara parsial. Secara simultan, variabel independen memengaruhi IPM secara signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan yang meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan IPM yang merata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Kata Kunci: IPM, UMK, Faktor Sosial Ekonomi, Kesehatan, Partisipasi Pendidikan

The Influence of Economic and Social Factors on the Human Development Index in the Former Kediri Residency

ABSTRACT

This study analyze the the Impact of the Minimum Wage in Regencies/Cities and the Open Unemployment Rate (TPT), Poverty Rate, Access to Health Care, and School Participation Rate (APS) on the Human Development Index (HDI) in the former Kediri Residency for the period 2019–2023. This study uses quantitative methods with panel data analysis and Stata 14 software. The results show that UMK and Health Access have a positive and significant impact on HDI, while TPT, poverty, and APS are not partially significant. Together, these independent variables significantly influence the HDI. These findings emphasize the importance of policies that increase productivity, community welfare, access to education and health, skills training, and job creation. These efforts are expected to encourage equitable HDI improvement while supporting regional and national economic growth.

Keywords: HDI, Minimum Wage, Socioeconomic Factors, Health, Educational Participation

How to Cite:

Tivani, L. A., & Arisetyawan, K. (2026). Pengaruh Faktor Ekonomi dan Sosial terhadap IPM di Eks Karesidenan Kediri. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 9(1), 102–114.

*Corresponding Author:

Email : kukuharisetyawan@unesa.ac.id

Alamat : Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya

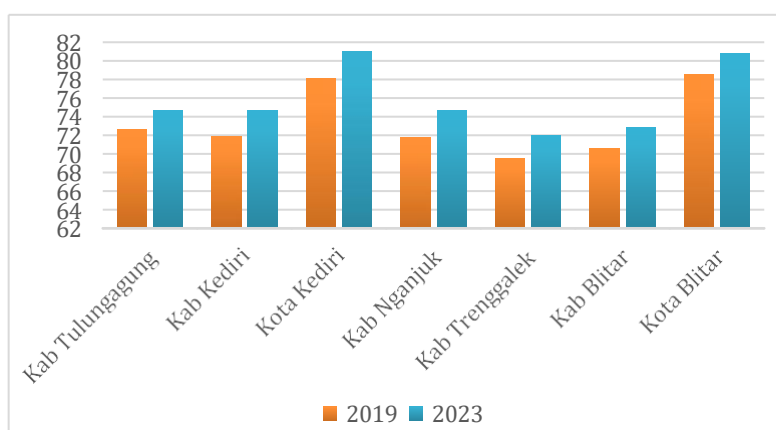


This article is published under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ialah suatu indeks yang menyatukan berbagai tolak ukur guna mengevaluasi kesuksesan suatu proses pembangunan kualitas hidup melalui tiga dimensi utama: kesehatan yang berkelanjutan, wawasan yang luas, serta kehidupan yang sejahtera (BPS, 2025). Dalam praktiknya, IPM dihitung berdasarkan beberapa indikator yang dimaksud adalah usia harapan hidup ketika lahir, rata-rata tahun yang dihabiskan untuk bersekolah, lamanya pendidikan yang diharapkan, serta belanja per kapita yang telah disesuaikan. Di Indonesia, IPM menjadi suatu target pembangunan daerah yang ada dalam RPJMN. IPM bukan hanya berfungsi sebagai indikator statistik, namun juga sebagai instrumen penting dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah, karena mencerminkan capaian kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh dibandingkan hanya menggunakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, disparitas dari IPM antar wilayah yang mengindikasikan adanya ketimpangan maupun ketidakmerataan akses pendidikan, akses kesehatan dan ekonomi yang menuntut terutama pemerintah daerah untuk membuat rancangan kebijakan pembangunan pada wilayah yang tertinggal guna mempercepat kualitas sumber daya manusia yang ada (UNDP, 2023).

Jika ditinjau pada level regional pada gambar 1, yang menampilkan perbandingan IPM antar kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Kediri terlihat adanya disparitas pembangunan manusia antarwilayah. Berdasarkan publikasi BPS Jawa Timur (2023), kawasan ini Cakupan areanya meliputi Kabupaten Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, serta dua kota administratif, yakni Kediri dan Blitar. mengalami perkembangan IPM yang bervariasi. Kota Kediri mencatat IPM tertinggi sebesar 81,13 pada tahun 2023 (kategori tinggi), sementara Kabupaten Trenggalek hanya mencapai 72,92 (kategori menengah atas). Perbedaan capaian tersebut menandakan bahwa meskipun daerah-daerah ini berdekatan secara geografis, masih terdapat ketimpangan pembangunan manusia yang perlu mendapat perhatian khusus agar kualitas hidup masyarakat lebih merata.



Gambar 1. Grafik IPM Eks Karisidenan Kediri 2019 – 2023

Sumber : BPS (2023)

Dalam kerangka teoritis, pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui *Capability Approach* yang diperkenalkan oleh Amartya Sen. Menurut pendekatan ini, pembangunan harus dipandang sebagai upaya memperluas kapabilitas manusia, yakni kebebasan nyata yang dimiliki setiap individu untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai. Peningkatan IPM yang mencerminkan adanya perluasan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan standar hidup yang layak. Pendekatan ini memperluas makna IPM dari sekadar angka yang mencerminkan kebebasan substantif menjadi bukti kuat bahwa individu memiliki kesempatan yang nyata untuk selalu menjalani kehidupan yang layak. Pendekatan ini menegaskan bahwa peningkatan dari IPM yang secara langsung memiliki nilai intrinsik karena memperluas kebebasan dan pilihan hidup manusia. *Capability Approach* memberikan justifikasi pada peningkatan IPM yang memungkinkan manusia menjalani hidup yang bermakna yaitu modal kemanusiaan sebagai tujuan. Landasan teoretisnya merujuk pada *Human Capital Theory* yang diperkenalkan oleh Becker (1964) dan dikutip dalam (Edi & A, 2019).

Komitmen pada pembangunan intelektual dan fisik bangsa merupakan upaya untuk mengembangkan kapasitas dan kontribusi personal. Dengan memperbaiki kualitas SDM melalui akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih bermutu, individu menjadi lebih produktif dan berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian. Dengan kata lain, peningkatan IPM melalui Pendidikan dan kesehatan memiliki nilai dan makna yang jauh melampaui sekadar mendorong kemajuan perekonomian negara jangka panjang, tetapi juga memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan. *Human Capital Theory* ini memberikan landasan yang krusial bagi peningkatan IPM yang berdampak pada individu yang lebih produktif, terampil dan memiliki kontribusi lebih besar terhadap perekonomian sehingga akan mencapai perkembangan ekonomi yang lebih tinggi. Teori ini juga memberikan justifikasi fungsional bahwa melalui pendidikan dan layanan kesehatan yang merupakan investasi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dan daya saing yang kuat.

Menurut *Human Development Report (Report & Overview, 2022)*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) merupakan ukuran ringkas atas pencapaian Kesejahteraan suatu masyarakat dinilai dari tiga pilar utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aspek kesehatan tercermin dari angka harapan hidup saat lahir. Sementara itu, dimensi pendidikan diukur berdasarkan lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan harapan untuk menempuh pendidikan. Adapun standar hidup yang layak diukur melalui besarnya Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per orang dengan memperhatikan paritas daya beli. Peningkatan ketiga dimensi ini secara simultan menjadi indikator dari taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan pondasi utama untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing suatu wilayah, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan IPM dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Salah satu faktor ekonomi penting adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Studi terbukti bahwa penetapan UMK berperan dalam mendorong pertumbuhan daya beli di tingkat masyarakat dan kesejahteraan pekerja, namun efektivitasnya bergantung pada produktivitas dan stabilitas ekonomi lokal. Kenaikan UMK yang tidak diimbangi produktivitas dapat menimbulkan efek kontra-produktif terhadap penciptaan lapangan kerja (Hamzah et al., 2021). Sejalan dengan Penelitian Resmana & Gunawan (2025) yang menemukan bahwa kenaikan peningkatan upah minimum berkontribusi pada membaiknya IPM karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki standar hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa upah masih memiliki dampak kompleks terhadap pembangunan yang dimana peningkatan upah tersebut harus terus diupayakan tanpa mengorbankan perluasan pada kesempatan maupun cakupan kerja. Sebaliknya, Endang & Anam (2024) temuan penelitian mengungkapkan bahwa semakin tinggi pengangguran terbuka, maka akan secara signifikan menekan IPM, sebab semakin banyak pengangguran akan menurunkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi pengangguran ini seringkali berkorelasi dengan tinggi pada angka kemiskinan, yang mana menurut Trisno et al. (2021), bahwa kemiskinan bersifat menghambat laju pertumbuhan IPM karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Di sinilah peran intervensi sosial menjadi sangat krusial, sebagaimana dinyatakan oleh Kurniawan et al., (2024), bahwa peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat secara langsung meningkatkan angka harapan hidup, yang merupakan salah satu dimensi penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan akses kesehatan yang lebih baik, kualitas hidup masyarakat meningkat, sehingga kontribusi individu terhadap pembangunan ekonomi juga menjadi lebih optimal. Sejalan dengan itu, dari penelitian Nastiti & Nailufar (2023) juga menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang merupakan proporsi dari penduduk kelompok sekolah tertentu yang sedang bersekolah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan persentase jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun keatas yang memiliki hubungan positif terhadap IPM di Indonesia, karena keduanya mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dan dunia kerja sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan memajukan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Namun demikian, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar riset berfokus pada level nasional atau provinsi, serta sering kali hanya meneliti satu atau dua variabel saja. Kajian yang komprehensif ini yang menguji secara simultan dari lima variabel utama yaitu upah minimum kabupaten, TPT (Tingkat pengangguran Terbuka), kemiskinan, akses kesehatan, dan APS pada level regional di kabupaten Kediri masih jarang dilakukan. Sebagian besar studi yang ada lebih cenderung menganalisis variabel variabel tersebut secara parsial Hal ini menimbulkan research gap atau celah penelitian yang perlu diisi. Padahal, Eks Karesidenan Kediri memiliki karakteristik unik dengan adanya Kota Kediri yang ber-IPM tinggi, akses kesehatan dan

APS juga cenderung tinggi di tengah kabupaten sekitarnya yang relatif rendah, sehingga kawasan ini sangat menarik untuk dianalisis secara mendalam. Wilayah ini dapat menjadi model miniatur dari ketimpangan regional yang terjadi pada tingkat nasional, di mana satu kota yang maju dikelilingi oleh daerah-daerah yang berjuang dalam mengejar ketertinggalan.

Pada analisis simultan lima variabel penentu IPM di level regional, dengan fokus pada Eks Karesidenan Kediri periode terbaru (2019–2023) dapat dikatakan menjadi kebaruan dalam penelitian karena berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung parsial, tidak hanya melihat hubungan langsung antara IPM dengan satu faktor, melainkan menyajikan analisis integratif yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini menggabungkan pendekatan teoritis melalui *Capability Approach* dan *Human Capital Theory* dengan analisis empiris berbasis data regional terkini.

Wilayah Eks Karesidenan Kediri dipilih sebagai lokus penelitian karena kawasan ini menawarkan keragaman karakteristik ekonomi dan sosial yang mencerminkan kesenjangan pembangunan di kawasan barat Jawa Timur. Sampai pada tahun 2024, kota Kediri menunjukkan IPM sebesar 81,88 yang jauh melampaui kabupaten lain di sekitarnya (BPS, 2024). Hadirnya Kota Kediri sebagai pusat pertumbuhan yang dikelilingi kabupaten dengan IPM lebih rendah menjadikannya konteks yang tepat untuk menganalisis faktor-faktor pendorong ketimpangan pembangunan manusia. Ketimpangan ini menjadikan wilayah ini konteks yang tepat untuk menganalisis faktor pendorong pembangunan manusia yang di mana pertumbuhan ekonomi terbukti dipengaruhi signifikan oleh IPM, kemiskinan dan upah minimum kabupaten/kota. Di samping itu, wilayah ini tengah mengalami transformasi cepat, ditandai dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta pergeseran struktur ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa, menjadikan kawasan ini relevan untuk diteliti dalam konteks pembangunan wilayah serta pemerataannya.

Adapun periode penelitian tahun 2019–2023 dipilih karena kurun waktu ini merefleksikan fase transformasi ekonomi dan sosial yang dinamis di tingkat regional. Rentang tersebut mencakup pelaksanaan berbagai kebijakan strategis pemerintah, seperti penyesuaian upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021, akselerasi pembangunan infrastruktur (contohnya Bandara Dhoho Kediri), serta program pemulihan ekonomi pasca melambatnya ekonomi global yaitu pasca terjadinya pandemi covid 19 di Indonesia. Data dalam periode ini juga merupakan yang paling mutakhir dan konsisten menurut BPS, sehingga memungkinkan analisis yang akurat dan aktual. Dengan cakupan lima tahun, penelitian ini dapat menangkap tren berkelanjutan pembangunan manusia sekaligus mengidentifikasi perubahan signifikan pada faktor-faktor yang memengaruhi IPM di Eks Karesidenan Kediri.

Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang fundamental: bagaimanakah pengaruh Upah Minimum Kabupaten, TPT, Kemiskinan, Akses Kesehatan, dan APS terhadap IPM pada wilayah Eks Karesidenan Kediri periode 2019–2023. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris serta teoretis terhadap pengembangan literatur mengenai faktor-faktor penentu IPM di level regional

dan sebagai bahan kajian bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan di wilayah Eks Karesidenan Kediri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan BPS kabupaten/kota di wilayah Eks-Karesidenan Kediri, yang berupa laporan dan publikasi resmi dari instansi terkait. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif, yang kemudian diuji berdasarkan serangkaian aturan analisis ekonomi.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis data panel yaitu jenis data yang mengkombinasikan dimensi cross-section (antar unit) dengan dimensi time series (runtun waktu). Sebagaimana dijelaskan oleh (Stock & Watson, 2020). Analisis data panel memungkinkan peneliti mengamati dinamika hubungan antarvariabel pada beberapa entitas dalam periode tertentu serta mengontrol heterogenitas yang tidak teramati. Penentuan model estimasi data panel yang optimal dilaksanakan dalam tiga tahap uji berurutan. Tahap pertama adalah Uji Chow guna menetapkan pilihan antara model common effect dan fixed effect. Tahap kedua, Uji Hausman, menguji konsistensi untuk membandingkan model fixed effect dengan random effect. Tahap terakhir, Uji Lagrange Multiplier, mengevaluasi efisiensi model random effect terhadap common effect. Dari proses tersebut, disimpulkan bahwa model random effect (RE) merupakan model yang paling sesuai dan akurat bagi penelitian ini.

Adapun model yang dianalisis dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = a + \beta_1 X1_{it} - \beta_2 X2_{it} - \beta_3 X3_{it} - \beta_4 X4_{it} - \beta_5 X5_{it} + U_{it}$$

Dalam konteks penelitian ini, model tersebut disesuaikan menjadi:

$$IPM_{it} = a + \beta_1 UMK_{it} - \beta_2 TPT_{it} - \beta_3 TK_{it} - \beta_4 AkKes_{it} - \beta_5 APS_{it} + U_{it}$$

Keterangan :

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
UMK	= Upah Minimum Kabupaten
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka
TK	= Tingkat Kemiskinan
AkKes	= Akses Kesehatan
APS	= Angka Partisipasi Sekolah
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \text{ dan } \beta_5$	= Koefisien
U	= Error Term
i	= Cross Section
t	= Time Series

HASIL DAN PEMBAHASAN**HASIL****Hasil Chow Test**

Proses pemilihan antara model Common Effect dan Fixed Effect diawali dengan melakukan estimasi terhadap model Common Effect terlebih dahulu yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan uji Chow guna menentukan model yang paling sesuai. Berdasarkan hasil Chow Test adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Chow Test

Effects Test	Statistic	Prob.
Cross-Section F	54.49	0,0000

Sumber: Data diolah, (Stata 14.0)

Dari hasil uji Chow Test, nilai Cross-section F yang didapat adalah 54,49 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas ini di bawah 0,05, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) tidak ditolak. Ini berarti model Fixed Effect adalah pilihan terbaik untuk menguji hipotesis dalam studi ini.

Hasil Hausman Test

Dari pelaksanaan uji Chow, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa H_0 ditolak, maka tahap analisis berikutnya dalam analisis adalah menerapkan uji Hausman. Sebelum menjalankan pengujian, tahap awal analisis dilakukan dengan mengestimasi model regresi data panel menggunakan pendekatan random effects. Setelah estimasi model diperoleh, uji Hausman kemudian diterapkan terhadap hasil estimasi tersebut. Berdasarkan hasil uji Hausman yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Hausman Test

Test summary	Chi-Sq. Statistic	Prob.
Cross-section random	4.1	0.5349

Sumber: Data diolah, (Stata 14.0)

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai Chi-square sebesar 4.1, dengan probabilitasnya mencapai 0.5349, yang ternyata lebih tinggi dari 0.05. Berdasarkan temuan ini, bisa disimpulkan bahwa model Random Effect adalah pilihan terbaik untuk melakukan estimasi regresi pada data panel.

Hasil Lagrange Multiplier Test

Uji yang dilakukan paling akhir adalah Uji Lagrange Multiplier (LM), yang digunakan untuk menentukan mana yang lebih sesuai antara model random effect dengan model common effect. Prosedurnya diawali dengan melakukan estimasi menggunakan model common effect, yang kemudian hasilnya diuji dengan metode Lagrange Multiplier. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada paparan di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Lagrange Multiplier Test

Random test	Statistic	Prob.
chibar-square	37.23	0,0000

Sumber: Data diolah, (Stata 14.0)

Hasil dari uji Lagrange Multiplier menunjukkan angka Chi-square sebesar 37.23, dengan probabilitas yang nol bulat, dan ini ternyata di bawah ambang signifikansi 0.05. Jadi, bisa kita simpulkan kalau model random effect lebih cocok dipakai buat mengestimasi regresi data panel ini.

Hasil Estimasi dengan Model Random Effect

Hasil estimasi model random effect, yang mencakup koefisien regresi dan ukuran statistik, disajikan dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Koefisien Korelasi dan Ukuran Statistik Model Random Effect

Variabel	Koefisien	t-statistic	Prob.
C	2.429638	9.80	0.000
X1	.1689267	10.99	0.000
X2	-.002778	- 0.32	0.747
X3	-.003478	- 0.61	0.544
X4	-.0469958	- 7.96	0.000
X5	-.0425955	- 1.66	0.098
R-Square	0.7772		
F-Statistic	249.09		
Prob. F-Statistic	0.0000		

Sumber: Data diolah, (Stata 14.0)

Pertama, Konstanta dengan nilai 2.429638 menunjukkan bahwa kalau semua variabel independennya tetap pada nol, maka IPM akan mencapai angka 2,43. Kedua, Nilai koefisien UMK sebesar 0.1689267 menunjukkan hubungan positif antara UMK dan IPM. Setiap kenaikan UMK sebesar 1 satuan, IPM meningkat 0.1689. Hubungan ini signifikan dengan nilai $p = 0.000$. Ketiga, Nilai koefisien TPT sebesar -0.002778 menunjukkan hubungan negatif antara TPT dan IPM. Setiap kenaikan IPM sebesar 1 unit, TPT turun sebesar 0.0027. Hubungan ini tidak signifikan dengan nilai $p = 0.747 > 0.05$. Keempat, Nilai koefisien Tingkat Kemiskinan sebesar -0.003478 menunjukkan hubungan negatif antara tingkat kemiskinan dan IPM. Setiap peningkatan kemiskinan sebesar 1 satuan, Indeks Pembangunan Manusia turun mencapai 0.0034. Hubungan ini tidak signifikan dengan $p = 0.544 > 0.05$. Kelima, Nilai koefisien Akses Kesehatan sebesar -0.0469958 menunjukkan hubungan positif antara Akses Kesehatan dan TPT. Setiap kenaikan Akses Kesehatan sebesar 1 satuan, IPM menurun sebesar 0.0469. Hubungan ini signifikan dengan $p = 0.000$. keenam, Nilai koefisien Angka Partisipasi Sekolah sebesar -0.0425955 menunjukkan hubungan negatif antara angka partisipasi sekolah dan IPM. Setiap kenaikan angka partisipasi sekolah sebesar 1 satuan, IPM turun sebesar 0.0425. Hubungan ini tidak signifikan dengan $p = 0.098$.

Berdasarkan hasil pengujian, model Random Effect dapat dirumuskan dalam persamaan regresi berikut :

$$IPM_{it} = 2.429 + 0.168UMK_{it} - 0.002TPT_{it} - 0.003TK_{it} - 0.046AkKes_{it} - 0.042APS_{it} + U_{it}$$

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), dapat diketahui bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan setiap variabel bebas dapat memengaruhi variabel terikat dinyatakan signifikan secara statistik apabila nilai probabilitasnya (p-value) lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh probabilitas upah minimum kabupaten sebesar 0.000, tingkat pengangguran terbuka 0.753, tingkat kemiskinan 0.593, akses kesehatan 0.000, dan angka partisipasi sekolah 0.533. Artinya, variabel upah minimum kabupaten dan akses kesehatan secara individual berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini selaras dengan penelitian Mahulauw et al., (2016) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran kesehatan berkontribusi nyata terhadap peningkatan IPM di Provinsi Maluku.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan model terbaik dinyatakan bahwa F-statistik adalah 168.04 dengan probabilitas senilai 0.0000. Dengan demikian, nilai probabilitas yang diperoleh berada di bawah tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel terikat dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor independen seperti upah minimum kabupaten dan akses kesehatan.

Koefisien determinasi (R^2)

Hasil regresi data panel dengan model Random Effect menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.7772. Ini mengindikasikan bahwa sekitar 77% variasi dalam Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu Upah Minimum Kabupaten, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Akses Kesehatan, dan Angka Partisipasi Sekolah. Sementara untuk 23% bisa dijelaskan diluar variabel. Hal ini dirasa wajar karena banyak faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia, tidak hanya upah minimum kabupaten namun sektor lainnya, sehingga demikian dapat menjelaskan pengaruh yang cukup besar pada *R-squared*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan kenaikan upah minimum, khususnya UMP, memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap kemajuan IPM. Dampak utamanya terwujud melalui peningkatan daya beli masyarakat, yang kemudian memperluas jangkauan akses layanan-layanan dasar penunjang kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan menjadi pilar penunjang kualitas hidup. Bukti empiris dari studi Nailufar et al. (2024) memperkuat pernyataan ini dengan menunjukkan bahwa peningkatan UMP secara signifikan berkontribusi pada naiknya IPM di lima provinsi Indonesia, yang ditandai dengan koefisien regresi positif dan tingkat signifikansi yang tinggi. Temuan ini pada akhirnya menegaskan bahwa kebijakan upah minimum di tingkat provinsi tidak hanya sekadar instrumen

ketenagakerjaan, melainkan dapat dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan yang efektif guna mempercepat peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh di Indonesia.

Efek positif upah minimum ini bukan hanya terbatas di skala provinsi, tetapi juga konsisten teramati pada level daerah yang lebih spesifik. Kajian yang dilaksanakan oleh Suffah et al. (2025) mengungkapkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdampak signifikan terhadap dinamika ketenagakerjaan, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat pada periode 2019–2023. Kenaikan UMK berperan dalam meningkatkan pendapatan buruh, yang kemudian memperluas kesempatan mereka untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan – dua pilar utama dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Walaupun studi ini tidak meneliti IPM secara langsung, keterkaitan tidak langsung antara upah minimum, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat memperkuat proposisi bahwa kenaikan upah minimum turut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia regional. Konsistensi ini semakin diperkuat oleh penelitian Safitri et al. (2020) di Kabupaten Grobogan, yang secara eksplisit menemukan bahwa peningkatan UMK berdampak langsung pada penurunan kemiskinan serta memberikan pengaruh positif terhadap IPM melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik potensinya yang besar, efektivitas kebijakan upah minimum sebagai instrumen pembangunan tidak bersifat mutlak. Agusalm & Novianti (2023) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum memang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia, tetapi efek positif tersebut hanya terjadi jika diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan efisiensi kerja.

Sebaliknya, apabila kenaikan upah tidak disertai dengan peningkatan produktivitas, kebijakan tersebut justru berisiko menurunkan daya saing industri lokal dan menghambat penciptaan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Tuwinanto & Rahadi (2021) yang menegaskan bahwa struktur upah dan skala upah harus disesuaikan dengan kompetensi tenaga kerja agar tidak menimbulkan efek kontra-produktif seperti menurunnya produktivitas atau meningkatnya beban biaya perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih komprehensif, yang mencakup peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasi, pemberian insentif bagi usaha produktif, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif di tingkat daerah. Kendati memiliki potensi yang signifikan, efektivitas kebijakan upah minimum sebagai pendorong pembangunan memiliki keterbatasan.

Sebuah studi oleh Rahmi & Riyanto (2022) mengingatkan bahwa dampak positif dari kenaikan upah minimum hanya akan terwujud jika didukung oleh peningkatan produktivitas pekerja. Tanpa itu, dunia industri justru akan terbebani oleh biaya yang membengkak dan berpotensi memicu penyusutan lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum perlu diintegrasikan ke dalam sebuah strategi yang komprehensif, mencakup program peningkatan keterampilan, efisiensi, dan pengelolaan produktivitas, untuk menciptakan titik temu yang ideal antara peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pemeliharaan daya saing industri. Dengan strategi

komprehensif tersebut, upah minimum akan berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai hasil dari keberhasilan kebijakan upah sekaligus keberhasilan pengelolaan produktivitas.

Pengaruh Akses Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akses kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Fasilitas kesehatan yang memadai mendorong peningkatan kualitas hidup karena masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian. Hasil penelitian oleh Firori & Wisana (2023), partisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat menurunkan risiko unmet need untuk layanan kesehatan, yang menunjukkan bahwa perluasan cakupan dan akses asuransi kesehatan memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kemudahan akses terhadap layanan kesehatan mendorong peningkatan AHH (Angka Harapan Hidup) serta produktivitas penduduk, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Individu yang sehat, mampu untuk bekerja lebih optimal, menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan standar hidup layak dalam indeks pembangunan manusia. Dengan demikian, program JKN tidak hanya berdampak pada kesehatan semata melainkan menjadi pondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang telah tercermin dalam indeks pembangunan manusia.

Di sisi lain, terdapat bukti bahwa peningkatan akses atau anggaran kesehatan tidak selalu berdampak positif. Menurut Mustofa & Satria (2025), meskipun pengeluaran kesehatan meningkat, pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat bersifat negatif atau tidak signifikan apabila terjadi inefisiensi penggunaan anggaran, ketimpangan akses fasilitas kesehatan antar wilayah, dan lemahnya pengawasan terhadap program kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya belanja kesehatan saja tidak cukup efektivitas, pemerataan, dan tata kelola fiskal juga menentukan seberapa besar kontribusi pengeluaran tersebut terhadap perbaikan IPM.

Menurut Arimbi et al., (2022), perluasan program JKN juga berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, pemerataan kualitas layanan kesehatan masih menjadi tantangan akibat ketimpangan infrastruktur dan sumber daya antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh cakupan program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara merata dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Awary et al. (., 2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM, khususnya melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi tenaga kerja di Jawa Timur. Dengan demikian, kebijakan upah minimum dan pemerataan akses kesehatan memiliki keterkaitan erat dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, sehingga strategi peningkatan IPM harus mencakup sinergi antara kebijakan

ketenagakerjaan dan pembangunan sektor kesehatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil di seluruh daerah.

SIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dari analisis data penelitian adalah kenaikan Upah Minimum pada Kabupaten/Kota (UMK) secara nyata berdampak positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah eks Karesidenan Kediri (Kab. Tulungagung, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Trenggalek, Kab. Blitar, Kota Blitar) selama periode 2019–2023. Artinya, ketika upah minimum naik, kesejahteraan masyarakat juga ikut terdorong melalui peningkatan daya beli, perbaikan kualitas pendidikan, serta kemudahan akses terhadap layanan kesehatan. Peningkatan daya beli ini dapat menjadi modal penting bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Namun di sisi lain, variabel Akses Kesehatan justru berdampak negatif dan secara signifikan terhadap tingkat IPM.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah fasilitas kesehatan bertambah, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan dalam hal fasilitas dan tenaga kesehatan antar daerah, sehingga manfaat dari penambahan akses kesehatan tersebut belum dapat dirasakan secara merata. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sektor kesehatan di wilayah ini masih menghadapi permasalahan struktural yang di mana kuantitas belum berbanding lurus dengan kualitas dan pemerataannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah di eks Karesidenan Kediri disarankan untuk tidak hanya fokus pada peningkatan upah, tetapi juga memperhatikan pemerataan kualitas layanan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan manusia di wilayah tersebut dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L., & Novianti, T. (2023). PEMBUKTIAN EMPIRIS TEORI UPAH EFISIENSI DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 14(2).
- Arimbi, D., Fuady, A., Aryana, S., & Dewi, A. (2022). Peluang dan Tantangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia : Studi Kebijakan. *JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI*, 11(1), 14–27.
- Awary, N., Sasmitaningroh, P. N., Sari, A. D., Nilasari, A., & Arisetyawan, K. (2024). PENGARUH UPAH MINIMUM DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DI JAWA TIMUR TAHUN 2018 – 2023. *Jurnal Bisnis Net Volume*, 7(2), 621–633.
- BPS. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri Tahun 2024*. 7, 1–10.
- BPS. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia 2024*. 19.
- Endang, & Anam, M. S. (2024). Menuju Ibu Kota Baru: Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 652–661.
- Firori, F. A., & Wisana, I. D. G. K. (2023). THE EFFECT OF PARTICIPATION IN JKN ON UNMET NEEDS FOR HEALTHCARE SERVICES. *Indonesian Journal of Health Administration*, 11(2), 186–195. <https://doi.org/10.20473/jaki.v11i2.2023.186-195>

- Hamzah, I. N., Firmansyah, & Parewangi, A. M. A. (2021). Minimum Wages, Relative Wages, and Productivity: An Empirical Analysis on Indonesia Food and Beverage Industry. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(1), 33–43. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090104>
- Kurniawan, Budhi, M. K. S., Yasa, I. N. M., & Tisnawati, N. M. (2024). Determinant of Life Expectancy in Indonesia: Bibliometrics Literature Review. *Malaysian Journal of Medical Research*, 9(1), 30–41.
- Mahulauw, A. K., Santosa, D. B., & Mahardika, P. (2016). PENGARUH PENGELUARAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN SERTA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI MALUKU. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 122–148.
- Mustofa, M. A., & Satria, P. B. (2025). Improving Human Development in Asia: Do Government Expenditure and Good Governance Matter? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 32(2), 158–176.
- Nailufar, F., Juliansyah, H., Murtala, & Risna. (2024). PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), PENANAMAN MODAL ASING (PMA), DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA (STUDI KASUS 11 PROVINSI IPM LOWER MEDIUM). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 07(1), 11–22.
- Nastiti, A. W., & Nailufar, F. (2023). Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 06(3), 1–9.
- Rahmi, J., & Riyanto. (2022). DAMPAK UPAH MINIMUM TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA: STUDI KASUS INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA (The Impact of Minimum Wage on Labor Productivity: Evidence from Indonesian Manufacturing Industry). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1), 1–12.
- Resmana, R. T., & Gunawan, R. (2025). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 34–47.
- Safitri, R., Baihaqi, J., & Supriyadi. (2020). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. *Iqtishoduna*, 16(1), 39–58.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2020). *Introduction to Econometric*.
- Suffah, D. A. F., A, A. R., Farida, S. N., S, G. Al, Naffriza, Faristanti, N., & Rahajeng, A. (2025). Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota, Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat Tahun 2019-2023. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(12), 257–264.
- Trisno, T. U., Munajat, & Oktarina, Y. (2021). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020. *Jurnal Bakti Agribisnis*, 7(02), 25–32.
- Tuwinanto, & Rahadi, D. R. (2021). Upah Minimum, Skala Upah dan Produktifitas Kerja. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(2), 214–222.